



Padi dan Kekuasaan

Ketika Padi Menjadi Urusan Raja

*Jejak awal padi di Nusantara dan lahirnya
tata kelola pangan pada masa kerajaan*

Episode 1.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

2026

Ketika Padi Menjadi Urusan Raja

**Jejak awal padi di Nusantara dan lahirnya tata
kelola pangan pada masa kerajaan**



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2026



Pengantar

Apabila kita berimajinasi jauh ke belakang, dapat dibayangkan sosok petani yang sedang berjalan di sepanjang pematang sambil membawa benih yang akan ditanam. Di hadapannya terhampar tanah berlumpur, yang dipenuhi air tertahan dan tersinari terik sinar matahari yang janjinya masih dapat dipegang untuk memastikan tanaman yang ditanam dapat dipanen. Ia melakukan rutinitasnya semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarganya. Namun dari pekerjaan yang tampak sederhana itulah, kelak kerajaan-kerajaan di Nusantara menemukan salah satu dasar kekuasaannya.

Padi masuk ke Indonesia mungkin awalnya sebagai tanaman seperti pada umumnya, sebelum pada akhirnya berubah menjadi tanaman yang istimewa. Apabila diilustrasikan sebagai proses, maka padi awalnya datang sebagai benih, kemudian tumbuh sebagai bahan pangan yang ternyata tidak pernah bosan dimakan dan dapat disimpan lama; sehingga pada akhirnya sejarah mencatat padi/beras secara perlahan menjadi “alat kekuasaan”. Ketika kerajaan-kerajaan awal mulai meninggalkan jejaknya pada batu, tembaga, kakawin, dan berita asing, padi sudah hadir sebagai urusan yang terlalu besar untuk dibiarkan hanya menjadi pekerjaan rumah tangga petani. Untuk menumbuhkannya, padi memerlukan air yang teratur, tanah yang diakui haknya, kerja gotong royong, pungutan yang tertib, dan penguasa yang sanggup menjaga keseimbangan antara kemakmuran dan kewajiban.

1

Padi datang
sebagai benih



2

Tumbuh sebagai
bahan pangan



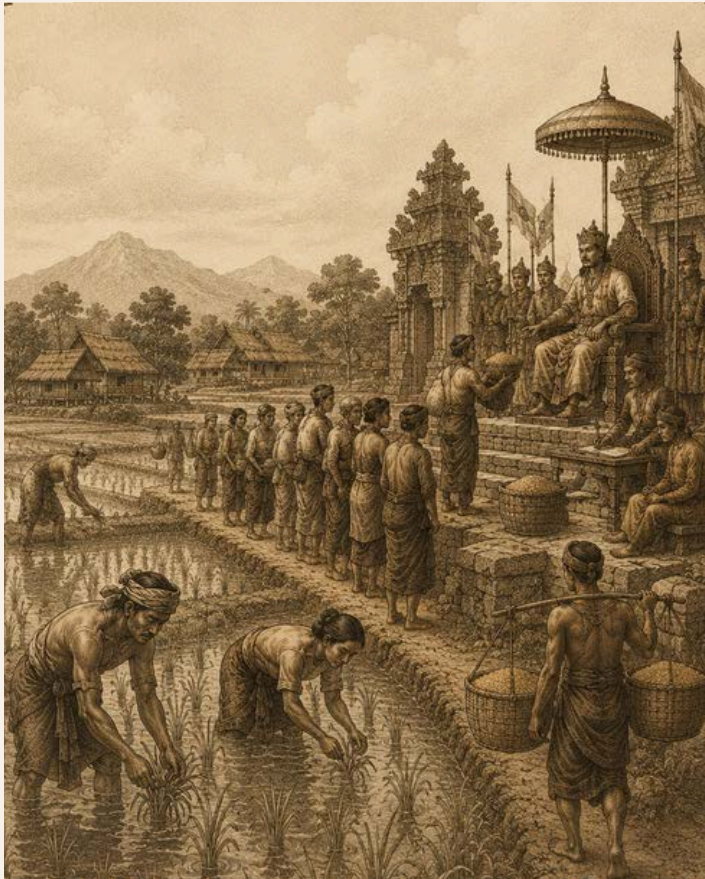
3

Tidak pernah bosan
dimakan dan
dapat disimpan lama



4

Sejarah mencatat
padi/beras menjadi
“alat kekuasaan”



Sejak awal, sejarah padi adalah sejarah hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Sebelum istilah ketahanan pangan dikenal, penguasa di Nusantara telah memahami bahwa untuk melanggengkan kekuasaan, maka harus mampu menjaga sumber makan penduduknya. Padi yang berubah jadi beras ternyata dapat dijadikan sebagai sumber pangan utama untuk penduduk, dan karena itulah padi/beras pada akhirnya mempunyai “dua muka”, yakni sumber kemakmuran sekaligus penindasan. Karena itu, kisah padi pada masa kerajaan bukan hanya kisah sawah, benih, dan panen. Ia adalah kisah tentang air, pajak, ritus, perdagangan, logistik perang, dan legitimasi.

Episode pembuka ini akan mengurai jejak panjang posisi padi/beras sebagai bahan pangan yang keberadaannya vital dan fatal; dari awal era kerajaan. Ceritanya dimulai sebelum kerajaan lahir, ketika padi telah lebih dahulu menempuh perjalanan menuju kepulauan Indonesia. Setelah itu, kisah bergerak ke era kerajaan Tarumanagara, Mataram Kuno, Airlangga, Kadiri, Singhasari, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Jejak sejarah padi melalui kerajaan-kerajaan tersebut ditelusuri melalui prasasti, catatan perang, bangunan suci, atau kisah para raja. Dari segala keriuhan perjalanan sejarah padi, ada satu yang dapat kita sepakati bersama, bahwa hingga saat ini padi tetap harus tumbuh, air yang harus dibagi, dan rakyat yang harus tetap dipastikan ketersediaannya.



Kemakmuran



Penindasan

Awal Mula Benih Padi Masuk ke Nusantara

Jauh sebelum ada Kerajaan Tarumanagara, Mataram Kuno, Kadiri, Singhasari, Majapahit, Demak, atau Mataram Islam hadir dalam catatan sejarah, padi telah lebih dahulu menempuh perjalanan panjang menuju kepulauan Indonesia. Bukti arkeologi botani (arkeobotani) penting, datang dari Minanga Sipakko di Sulawesi Barat. Di situs itu, Deng dan kawan-kawan menemukan fitolit daun dan sekam padi yang menunjukkan keberadaan padi (*Oryza sativa*) di Nusantara sekitar 3.500 tahun lalu. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan padi bukan muncul saat era masa kerajaan, melainkan bagian dari perubahan besar masyarakat Nusantara sejak masa prasejarah akhir [1].



Perjalanan padi menuju kepulauan Indonesia tidak berlangsung sebagai satu peristiwa tunggal. Peter Bellwood menempatkan penyebaran pertanian, bahasa, dan perpindahan penutur Austronesia sebagai proses panjang yang menghubungkan Asia daratan, Taiwan, Filipina, dan kepulauan Asia Tenggara [2]. Riset genetika padi oleh Alam dan kawan-kawan memperkuat informasi tersebut dengan menunjukkan jalur penyebaran yang rumit di kawasan Taiwan dan Asia Tenggara, tempat perpindahan (migrasi) manusia, pilihan ekologi, dan penyesuaian tanaman saling berinteraksi [3].



Gambaran awal masuknya padi ke Nusantara penting untuk diketahui, karena kerajaan tidak mengembangkan padi dari ruang kosong. Kerajaan mewarisi tanaman yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat; dan yang dilakukan kerajaan adalah mengubah padi menjadi urusan pemerintahan. Ketika penduduk makin menetap, desa makin terorganisasi, dan tanah makin bernilai, padi secara perlahan menghubungkan rumah tangga petani dengan pusat kekuasaan. Bagi petani, padi dalam bentuk gabah adalah bahan pangan pokok, benih untuk musim tanam berikutnya, cadangan pangan keluarga, dan ukuran aman tidaknya kecukupan pangan. Sementara itu, bagi penguasa, padi menjadi pertanda kemakmuran, sumber pajak (baca: upeti), serta alasan untuk mengatur air dan lahan.

Perjalanan sejarah padi dari awal masuk hingga ke era kerajaan menarik untuk dicermati. Benih padi yang ditanam petani pada awalnya hanyalah “pangan biasa”, pelan-pelan masuk ke dalam ranah kerajaan dengan dinamika pengelolaannya. Lahan sawah berubah menjadi lebih dari sekadar hamparan tanah basah. Hamparan sawah berubah menjadi wilayah yang harus diatur kepemilikannya, ditetapkan pungutannya (upeti), dijaga dan diatur pengelolaan airnya, dan dipakai untuk menilai apakah sebuah kekuasaan benar-benar berpihak ke rakyat atau sebaliknya.



Mengapa Padi Mudah Menjadi Pangan Kekuasaan

Dalam sejarah pangan Nusantara, padi bukan satu-satunya sumber bahan pangan. Umbi-umbian, sagu, pisang, kelapa, jagung pada masa yang lebih kemudian, dan berbagai tanaman lokal lain tetap penting dalam kehidupan banyak masyarakat dan tidak sedikit yang bertahan hingga saat ini. Namun padi sawah memiliki karakteristik yang membuatnya masuk ke dalam catatan kekuasaan. Selain karakteristik teknis, padi yang telah menjadi beras rasanya enak, mudah diolah, serta mudah dan tahan lama disimpan. Dari aspek teknis, pertanaman padi membutuhkan lahan yang dibentuk menjadi sawah (ada pematang untuk menahan air), pengaturan air masuk dan keluar, kerja gotong royong (mulai dari olah tanah, tanam, hingga panen), waktu tanam berdasarkan musim hujan dan kemarau, serta pengakuan atas hak dan kewajiban. Semakin luas lahan sawah dibuka, semakin besar pula kebutuhannya.



Jan Wisseman Christie menunjukkan bahwa prasasti-prasasti Jawa Kuno menyimpan banyak keterangan tentang tanah pertanian, hak atas air, pejabat desa, dan hubungan antara wilayah permukiman (desa) dengan kraton (kerajaan) [4]. Dalam catatan prasasti, umumnya tidak menarasikan secara khusus terkait padi. Keberadaan budi daya padi dihadirkan melalui istilah sawah, sima, pajak, persembahan, dan pengaturan desa. Jejak semacam ini lebih kuat daripada sekadar pernyataan bahwa masyarakat makan nasi, sebab ia memperlihatkan bagaimana padi telah menjadi bagian dari kerja pemerintahan.

**“Semakin luas lahan sawah dibuka,
semakin besar pula kebutuhan
pengelolaannya.”**

Prasasti Canggal (732 M) memberi petunjuk lain. Dalam prasasti yang dikaitkan dengan Raja Sanjaya itu, Yava atau Jawa digambarkan sebagai pulau yang berlimpah biji-bijian, termasuk padi, serta kaya tambang emas [5]. Ungkapan itu menempatkan kesuburan lahan pertanian sebagai bagian dari gambaran kemakmuran dan legitimasi raja. Seorang penguasa dipuji bukan hanya karena menang perang atau mendirikan bangunan suci (misalnya candi dan tempat persembahyangan). Sosok raja yang dipuja rakyatnya, tidak sedikit yang digambarkan sebagai sosok yang mampu mengatur dan mengelola lahan pertanian, dengan segala peraturannya secara berkeadilan; yang pada akhirnya dapat menyediakan bahan pangan yang cukup bagi rakyatnya dan menopang tatanan politik.



Prasasti Canggal

Perbedaan antara padi/beras sebagai bahan pangan dan padi/beras sebagai urusan negara mulai terlihat di sini. Sebagai bahan pangan, padi/beras berada di dapur rakyat; sementara sebagai komoditas strategis, ia berada di pusat keputusan kerajaan. Raja yang mampu mengatur air dan tanah dapat memperluas lahan sawah; dan lahan sawah yang terjaga dan terkelola dengan baik, akan menghasilkan surplus pangan. Surplus pangan berarti memberi ruang bagi upacara persembahan; membangun dan mengelola bangunan suci; serta mencukupi kebutuhan prajurit, pekerja, pedagang, dan pejabat kerajaan. Dengan demikian, keberadaan padi/beras menjadi vital dan fatal. Sebagai bahan pangan strategis (vital), ketika pengelolaannya gagal, dapat segera berubah menjadi fatal (*chaos*) ketika rakyat berebut mendapatkan pangan beras.

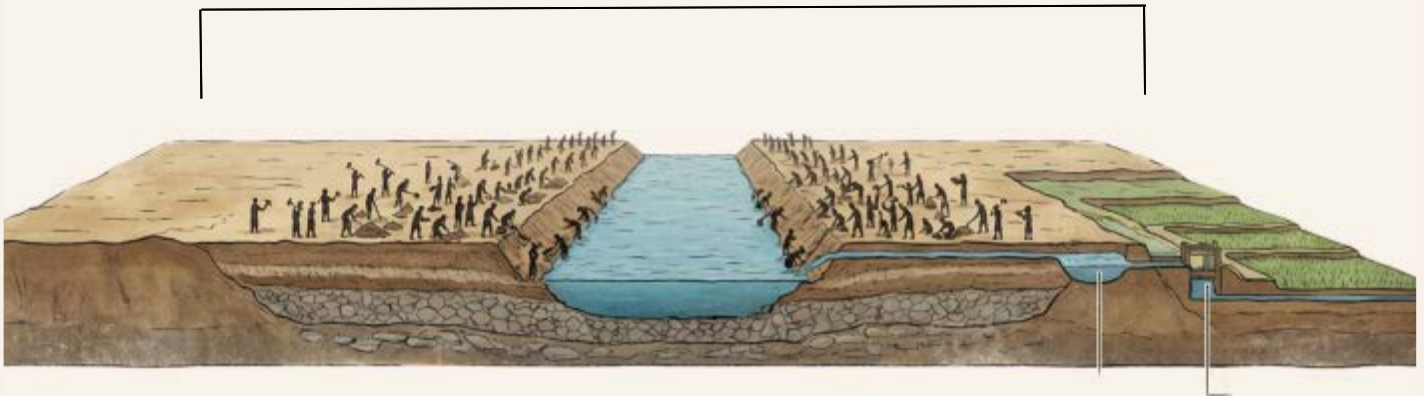
Tarumanagara dan Pelajaran dari Sungai

Pembangunan Kanal Sungai Gomati

PANJANG 6.122 DHANUSA (~10-12 KM)

WAKTU: 21 HARI

TAHUN KE-22 PURNAWARMAN



Jejak awal yang memperlihatkan hubungan penguasa dengan tata air dapat ditemukan pada Kerajaan Tarumanagara. Prasasti Tugu, yang umumnya ditempatkan pada pertengahan abad kelima Masehi, merekam pekerjaan mengatur sungai pada masa Raja Purnawarman. Noorduyt dan Verstappen menempatkan prasasti ini sebagai bukti penting tentang pekerjaan mengatur sungai di sekitar Tugu (posisi sekarang dekat Tanjung Priok) [6]. Teks Prasasti Tugu menyebut penggalian aliran Sungai Gomati (kanal) sepanjang 6.122 dhanusa (sekitar 10-12 kilometer), dan pekerjaan itu diselesaikan dalam dua puluh satu hari pada tahun ke-22 pemerintahan Purnawarman [7].

Berdasarkan prasasti Tugu tersebut, terungkap bahwa di era Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah memperhatikan pentingnya mengelola sumber air sebagai sarana perhubungan, sekaligus irigasi untuk keperluan pengairan lahan sawah. Disebutkan dalam prasasti tersebut, bahwa Sang Raja membangun

kanal Sungai Gomati yang tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan banjir dan mengatur penyediaan air, bagi lahan sawah saat musim kemarau. Dalam konteks kerajaan awal, tindakan semacam itu memperlihatkan bahwa raja telah mengambil peran sebagai pengatur lingkungan. Ia tidak hanya sekadar memerintah rakyatnya, namun mengerahkan tenaga kerja penduduknya untuk menata air. Untuk merayakan rampungnya saluran air ini, Raja Purnawarman mengadakan upacara selamat dengan menyumbangkan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana.



Pembangunan kanal sungai Gomati dapat dipahami sebagai kepedulian raja kepada rakyatnya. Secara filosofis, air dapat menjadi berkah, tetapi juga dapat menjadi sumber bencana. Dalam kaitannya dengan pertanian, keberadaan air yang terlalu besar, dapat merusak sawah; namun bila air ketersediaannya terbatas atau bahkan kering sama sekali, maka pertanaman akan gagal tumbuh. Pembangunan kanal yang dicatat dalam prasasti Tugu tidak hanya menunjukkan kemampuan teknik, tetapi juga menunjukkan pesan politik. Penguasa ingin dilihat sebagai orang yang mampu mengubah air yang liar, menjadi kehidupan yang tertata dan bermanfaat bagi penduduknya.



Kerajaan Tarumanagara memberi pelajaran penting bagi awal sejarah padi. Sejarah padi sebagai komoditas strategis tidak selalu dimulai dari kata padi. Ia dapat dimulai dari sungai, karena di wilayah monsun, siapa yang mengatur air ikut menentukan siapa yang dapat menanam, siapa yang dapat panen, dan siapa yang dapat bertahan.



Mataram Kuno dan Lahirnya Tata Kelola Sawah

Pada abad kedelapan dan kesembilan, Jawa Tengah memperlihatkan bentuk pemerintahan yang semakin canggih. Prasasti Canggal (723 M) memberikan informasi awal tentang tanah Jawa yang subur. Letak prasasti di kawasan Gunung Wukir, Magelang (kawasan subur diantara lereng pegunungan) secara tidak langsung mencerminkan kesadaran penguasa pada masa itu, untuk membangun pusat pemerintahan di wilayah dengan lahan pertanian yang sangat potensial. Beberapa dekade kemudian, prasasti-prasasti masa Mataram Kuno semakin banyak memperlihatkan hubungan antara tanah, desa, agama, dan pungutan. Di sinilah keberadaan padi/beras makin jelas masuk ke jaringan kekuasaan melalui sawah dan sima.

Sima pada era Mataram Kuno adalah sebidang lahan produktif (seperti sawah atau kebun) atau sebuah desa yang berstatus sebagai tanah perdikan. Tanah ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan dan biasanya diperuntukkan khusus untuk pemeliharaan bangunan suci atau tempat peribadatan. Hasil bumi dari tanah sima biasanya dikelola oleh para pendeta atau pemuka agama setempat untuk membiayai kegiatan ritual keagamaan. Kajian Christie tentang prasasti Jawa awal abad kesepuluh memperlihatkan keterkaitan sima dengan perubahan status fiskal (baca: pajak), pejabat yang melaksanakan perintah raja, serta hubungan antara penduduk, desa, dan pusat pemerintahan [8].

Keberadaan sima yang dikaitkan dengan pertanian, sangat menarik untuk dicermati. Sima merupakan salah satu perwujudan perhatian kerajaan terhadap rakyatnya, dengan memberikan sebagian lahan milik kerajaan untuk dikelola sebagai tempat peribadatan. Daerah yang sudah ditetapkan sebagai sima, maka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak ke kerajaan. Sebagai gantinya, hasil bumi yang dihasilkan di lahan sima digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan perayaan doa tempat peribadatan. Konsekuensi lebih lanjut dari perubahan tata kelola pajak tersebut adalah, hasil bumi yang dihasilkan di lahan sima, dibagi antara kerajaan, pengelola tempat peribadatan, dan penduduk setempat; masing-masing sebesar sepertiga bagian. Perubahan penting lain yang menarik adalah, struktur tanggung jawab penduduk di wilayah sima yang awalnya bertanggung jawab ke kerajaan, berubah menjadi ke kepala sima (Bathara).



Prasasti Harinjing memberi contoh yang lebih dekat dengan tata kelola air. Teks yang berasal dari tahun Saka 706 atau 804 M itu mencatat peran Bhagawanta Dhari dalam pekerjaan dawuhan di aliran Harinjing [9]. Dalam tradisi Jawa Kuno, dawuhan berkaitan dengan bangunan air, saluran, atau bendung. Atas jasanya, Raja memberikan hak istimewa (tanah sima) kepada Bhagawanta Dhari. Wilayah ini dibebaskan dari pajak dengan syarat sebagian hasilnya digunakan untuk pemeliharaan bendungan dan bangunan suci. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa penguasa memberi pengakuan terhadap kerja yang menjaga aliran air. Dalam masyarakat daerah pesawahan, jasa semacam ini bernilai politik karena hasil pertanian tidak hanya bergantung pada kesuburan tanah, tetapi juga pada keteraturan air. Prasasti Harinjing menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Kuno telah memiliki kesadaran teknis yang maju dalam memodifikasi alam, serta membentuk sistem birokrasi dan pajak yang dikhususkan untuk keberlanjutan irigasi.



Petugas Pengatur Air dan Kerja Sunyi di Pematang

Salah satu kekuatan sejarah padi pada masa kerajaan justru terletak pada tokoh-tokoh kecil yang jarang disebut dalam cerita besar. Mereka bukan raja, bukan panglima, dan bukan pujangga istana; namun perannya sangat vital dalam memelihara dan mengatur pembagian air secara berkeadilan. Dalam beberapa prasasti Jawa dan Bali, Christie menemukan rujukan kepada petugas pengelola air, teknisi pengendalian air, pungutan kecil yang terkait pertanian beririgasi, serta pembebasan pajak untuk mendorong perluasan sawah berair [4].

Salah satu ciri khas dari lahan sawah adalah, aliran air antar petak sawah yang saling terhubung serta harus seimbang antara air masuk dan keluar. Keberadaan ciri khas tersebut, mengkondisikan saling pengertian antar petani pemilik lahan dalam satu hamparan, agar senantiasa memperhatikan aliran air dan pematang sawah untuk memastikan tidak ada kebocoran. Singkat kata, pertanaman padi membutuhkan kerja gotong royong dan saling pengertian antar petani. Kemalasan atau ke-egoisan satu orang, dapat memicu malapetaka tetangga atau bahkan seluruh petani dalam satu hamparan. Satu orang malas memelihara atau memperbaiki pematang, dapat memicu kecemasan petani lain yang menerima air terlalu banyak atau terlalu sedikit.

Sosok pengatur air, walaupun tugasnya terkesan sederhana, namun mempunyai fungsi penting dalam kerajaan. kekuasaan raja dapat terganggu jika rakyatnya saling bertengkar memperebutkan air. Untuk itu, Raja membutuhkan bantuan petugas pengelola air yang sangat paham kapan air akan datang melimpah dan kapan akan mengalami keterbatasan. Prinsipnya, tata kelola air menjadi salah satu ilmu manajemen tertua yang tetap diperlukan hingga saat ini. Dari pengelolaan air yang sepintas terlihat sederhana, namun keteraturan dan keadilannya memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan petani; melalui hasil panen yang diperolehnya

Airlangga, Brantas, dan Politik Pemulihan



Setelah pusat kekuasaan bergeser ke Jawa Timur, hubungan antara padi, air, dan negara semakin erat dan kuat. Pada masa Airlangga, kerajaan menghadapi tantangan lingkungan (sering mengalami banjir) di sekitar lembah Sungai Brantas. Prasasti Kamalagyan tahun 1037 M mencatat pembangunan bendungan Waringin Sapta untuk mengatasi banjir dari Sungai Brantas [10]. Keterangan tentang prasasti ini menempatkan Kamalagyan sebagai bukti penting tata kelola air pada masa Airlangga, terutama karena banjir mengganggu permukiman,

persawahan, dan lalu lintas niaga di wilayah hilir [11].

Airlangga kerap dikenang sebagai raja yang memulihkan ketertiban politik awal abad kesebelas. Pemulihan politik itu diyakini berkaitan dengan upaya ketersediaan pangan dan pengelolaan air; karena bendungan, sungai, dan sawah memberi dasar bagi kehidupan desa, sedangkan ekonomi desa memberi dasar bagi kerajaan untuk menetapkan upeti dan keamanan stok pangan. Dalam konteks itu, Kamalagyan menunjukkan bahwa kebijakan air bukan sekadar pekerjaan teknis; namun sebagai bagian dari tindakan politik untuk mengembalikan kepercayaan penduduk kepada kerajaan.

Sungai Brantas kemudian menjadi salah satu nadi penting ekonomi Jawa Timur; karena mulai dari hulu sampai delta, aliran sungai ini menghubungkan pertanian pedalaman dengan pelabuhan dan perdagangan. Sebagai bahan pangan pokok, padi/beras dengan cepat menjadi salah satu komoditas perdagangan yang penting. Keberadaan pangan beras yang harus tersedia sepanjang waktu, memantik munculnya kelembagaan lumbung gabah/beras dan tata niaga perberasan. Ketika kerajaan mampu mengamankan ketersediaan bahan pangan pokok untuk penduduknya, dan keperluan diplomasi antarkerajaan (termasuk perang); maka masa kekuasaannya akan relatif lama.

Pada titik ini, pertanaman padi tanpa disadari telah menjadi simbol hubungan antara kemakmuran dan kepercayaan. Rakyat mungkin tidak membaca prasasti, tetapi mereka merasakan tata kelola air oleh kerajaan telah menjauhkan mereka dari ancaman bahaya banjir, dan memastikan sawah terairi dan berkecukupan hingga panen. Kepercayaan masyarakat akibat rasa aman dan kemakmuran yang diperolehnya, pada akhirnya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan raja dan kerajaan.



Kadiri, Singhasari, dan Majapahit di Atas Fondasi Sawah

Pada masa Kadiri dan Singhasari, sumber sejarah memperlihatkan gambaran kerajaan yang makin kaya secara sastra, politik, dan ekonomi. Naskah-naskah kakawin memberi gambaran tentang kehidupan elite, perang, upacara, dan tatanan moral; namun di bawah kemegahan itu tetap ada fondasi agraris. Kerajaan yang mampu membiayai pujangga, bangunan suci, dan ekspedisi militer, tetap memerlukan desa-desa yang menghasilkan bahan pangan secara berkecukupan dan berkelanjutan. Gambaran tersebut mempertegas peran penting padi/beras (walaupun di belakang layar) untuk mendukung perkembangan era kerajaan yang semakin maju, melalui fungsinya sebagai bahan pangan pokok.

Pada abad keempat belas, Majapahit memperlihatkan hubungan yang lebih luas antara pusat kerajaan, desa, dan wilayah taklukan. Nagarakrtagama karya Mpu Prapanca tahun 1365 sering menjadi pintu masuk untuk memahami dunia Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Pigeaud menempatkan teks ini sebagai sumber penting untuk melihat geografi politik, perjalanan raja, bangunan suci, dan struktur elite Majapahit [12]. Dalam kajiannya tentang ekonomi abad keempat belas, Pigeaud juga menegaskan bahwa ekonomi Jawa sejak masa awal bertumpu kuat pada pertanian, khususnya padi, baik melalui ladang, teras, maupun sawah beririgasi [13].

Kejayaan Imperium Majapahit dibangun di atas fondasi sistem agraria yang sangat terorganisir, di mana budi daya padi sawah berfungsi sebagai pilar fisik sekaligus administratif kerajaan. Kekuatan negara diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang masif, termasuk bendungan, saluran drainase, dan sawah terasering yang memungkinkan Majapahit menyatukan kekuatan wilayah-wilayah agraris di Jawa di bawah satu komando pusat. Pengelolaan lahan sawah ini tidak sekadar soal teknis pertanian, tetapi juga diatur melalui tata kelola pemerintahan dan praktik peradilan yang terstandarisasi berdasarkan hak penguasaan lahan, yang menjadikan padi sebagai instrumen integrasi politik, ekonomi, dan sosial yang sangat kuat [14].

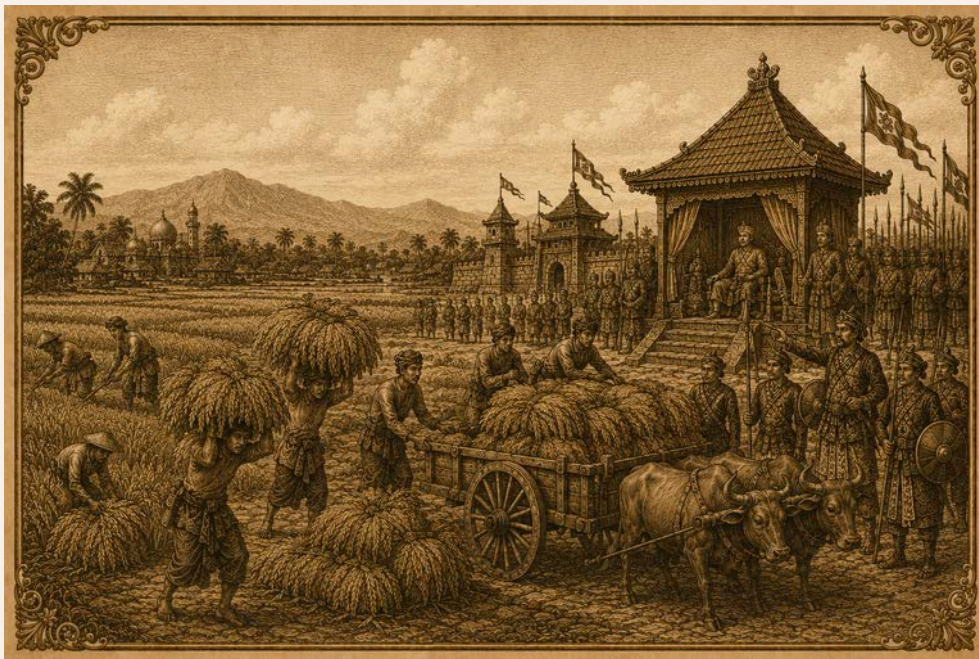


Dalam dinamika ekonominya, padi berkembang menjadi komoditas ekspor Majapahit yang paling menguntungkan dan menjadi penggerak utama jaringan perdagangan internasional. Melalui koneksi hulu-hilir yang menghubungkan pedalaman subur dengan pelabuhan-pelabuhan pantai utara, padi ditukarkan dengan berbagai komoditas impor mewah seperti keramik dari Tiongkok dan Vietnam serta tekstil sutra. Aktivitas pasar yang masif ini mendorong penggunaan koin tembaga Tiongkok (picis) sebagai alat pembayaran tunai dalam transaksi hasil pertanian, yang pada gilirannya membiayai pencapaian puncak budaya Jawa dalam bidang sastra, arsitektur, dan kesenian seperti wayang serta gamelan [14].

Meskipun padi menjadi poros kekuatan, kontrol atas distribusinya juga menjadi faktor penentu kemunduran Majapahit ketika dominasi pusat mulai melemah. Munculnya pelabuhan-pelabuhan merdeka di pesisir yang dipimpin oleh para elite pedagang (orang kaya) menciptakan monopoli baru atas perdagangan produk bahan pokok, termasuk beras, yang sebelumnya dikendalikan oleh kerajaan. Kemampuan para penguasa pelabuhan ini dalam menguasai jalur logistik pangan dan perdagangan maritim, membuat mereka akhirnya memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit, dan mengalihkan loyalitas pada pusat-pusat kekuatan baru. Perubahan kontrol atas sumber daya padi/beras inilah yang secara signifikan mempercepat runtuhnya integritas wilayah Majapahit pada abad ke-15 [14].

Dari Kerajaan Islam ke Mataram dan Beras sebagai Logistik Perang

Peralihan menuju kerajaan-kerajaan Islam di Jawa tidak menghapus kedudukan padi. Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, berdiri di atas dunia agraris yang telah terbentuk sebelumnya. Perubahan agama, jaringan dagang, dan pusat politik tidak serta-merta mengganti dasar pangan penduduk. Beras tetap menjadi sumber energi sosial yang menghidupi desa, pasar, pesantren, prajurit, dan istana. Pada masa Sultan Agung, terutama tahun 1628 dan 1629, beras tampil sebagai energi yang menggerakkan perang Mataram melawan VOC di Batavia. Serangan dari pedalaman Jawa ke pesisir barat, menuntut bekal dalam jumlah besar, jalur angkutan yang aman, dan kemampuan mempertahankan pasokan selama pengepungan berlangsung. Keberanian prajurit hanya dapat bekerja bila kebutuhan pangan pasukan tersedia secara memadai; dan bagi pasukan Jawa, beras adalah dasar kekuatan itu.



H.J. de Graaf memperlihatkan besarnya ambisi Mataram untuk menundukkan pusat kekuatan di pesisir barat Jawa pada masa Sultan Agung [15]. Catatan tentang pengepungan Batavia juga menunjukkan bahwa pasukan Mataram akhirnya terpaksa mundur karena kekurangan makanan [16]. Peristiwa itu menyampaikan pesan yang tajam, yakni dalam perang, beras dapat menjadi senjata tanpa bentuk. Ia tidak melukai seperti tombak, tetapi ketiadaannya dapat meruntuhkan barisan.

Pengalaman Mataram menunjukkan sisi fatal dari beras. Selama tersedia, beras membuat pasukan dapat bergerak, mengepung, menunggu, dan bertahan. Ketika pasokan terganggu, kekuasaan sebesar apa pun kehilangan tenaga. Di sini padi tidak lagi hanya menjadi simbol kesuburan dan legitimasi, namun menjadi batas nyata dari ambisi politik. Raja boleh memiliki kehendak besar, tetapi kehendak itu tetap harus didukung logistik pangan bagi prajurit secara memadai.

Pembelajaran Peran Padi/Beras di Era Kerajaan

Dari Tarumanagara sampai Mataram Islam, pertanian padi berkali-kali muncul sebagai salah satu ukuran kejayaan suatu kerajaan. Raja yang baik bukan hanya raja yang menang perang atau membangun bangunan suci; namun ia juga raja yang mampu menjaga air, melindungi sawah, memberi ruang bagi desa, dan memastikan pangan tetap tersedia. Dalam masyarakat agraris, legitimasi penguasa sering bermula dari hal-hal kecil yang secara nyata dirasakan penduduk, seperti ketersediaan air, keterjaminan panen, pajak yang wajar, dan infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai untuk mobilitas dan memasarkan hasil bumi.

Pertanian padi telah mengajarkan pentingnya kerajaan memperhatikan wilayah kekuasaannya, khususnya desa atau wilayah sentra produksi. Sehebat apa pun raja, ia tetap membutuhkan petani yang menanam, penjaga air yang membagi aliran, pedagang, dan lumbung untuk menyimpan cadangan pangan masyarakat dan kerajaan. Karena itu, sejarah padi pada masa kerajaan sebaiknya tidak dipahami sebagai cerita tentang masa lalu yang terpisah dari kondisi saat ini. Salah satu pelajaran penting dari masa kerajaan adalah bahwa padi tidak hanya hidup di pedalaman. Begitu panen melewati lumbung desa, ia masuk ke pasar, pelabuhan, dan jaringan niaga. Beras memberi makan orang yang tidak lagi berada di sawah, namun termasuk pedagang, awak kapal, prajurit, pendeta, pengrajin, dan penduduk kota.



Semakin ramai sebuah pelabuhan, semakin besar pula kebutuhan pangan hariannya. Di sinilah hubungan antara kerajaan agraris dan dunia maritim menjadi lebih jelas. Kapal dapat membawa barang jauh melintasi laut, tetapi awak kapal tetap membutuhkan makanan. Pasar dapat memperdagangkan kain, garam, logam, rempah, atau hasil hutan, tetapi orang-orang yang bekerja di pasar tetap memerlukan nasi atau pangan pengganti. Beras menjadi pengikat tak kasat mata, antara pedalaman dan pesisir. Karena itu, padi tidak boleh dipahami hanya sebagai tanaman desa, namun ia juga merupakan bahan bakar sosial bagi dunia yang bergerak. Ketika pedalaman menghasilkan surplus, pesisir menjadi lebih hidup; dan ketika pasokan dari pedalaman tersendat, kota dan pelabuhan merasakan akibatnya. Kelak pada masa VOC dan Hindia Belanda, hubungan ini akan menjadi semakin keras karena beras masuk ke gudang dagang, daftar harga, dan kebijakan kolonial. Namun benih hubungan itu telah lama tumbuh pada masa kerajaan.

Penutup

Sejak bukti arkeobotani prasejarah hingga prasasti kerajaan, perjalanan padi di Indonesia memperlihatkan pola yang konsisten. Padi mula-mula hadir sebagai tanaman yang menyesuaikan diri dengan tanah, air, musim, dan kebiasaan manusia. Setelah kerajaan muncul, pertanaman padi berubah menjadi urusan yang lebih luas. Ia masuk ke dalam pekerjaan yang berkaitan dengan sungai pada masa Kerajaan Tarumanagara, bahasa kesuburan pada masa Mataram Kuno, tata sima dan sawah dalam prasasti Jawa, pekerjaan air pada masa Airlangga, fondasi agraris Majapahit, dan logistik perang Mataram.

Argumen penting dari episode pertama ini sederhana, yakni padi menjadi pangan utama dalam sejarah kerajaan bukan karena pangan lain tidak ada; melainkan karena padi paling kuat tersambung dengan kebutuhan negara. Ia menuntut air, tanah, tenaga kerja, aturan, dan perlindungan; dan dari perpaduan itu semua, membuat padi mudah berubah dari tanaman biasa menjadi komoditas strategis dan vital. Namun makna vital selalu menyimpan sisi fatal. Jika air gagal diatur, sawah terganggu dan produksi akan gagal, maka kerajaan tidak dapat memungut pajak/upeti dan masyarakat bisa ribut. Sejak masa kerajaan, padi sudah mengajarkan bahwa urusan perut rakyat tidak pernah jauh dari urusan takhta. Dari sini, cerita bergerak menuju babak berikutnya, yakni ketika kekuasaan asing mulai masuk lebih dalam ke Nusantara. Beras yang semula menopang kerajaan, desa, dan perang lokal; pelan-pelan ditarik ke dalam jaringan dagang, pajak, pelabuhan, irigasi kolonial, dan pengendalian harga. Padi tetap tumbuh di sawah, tetapi dunia yang mengelilinginya berubah; dan episode berikutnya akan mengikuti perubahan itu, ketika beras mulai masuk ke bayang-bayang kolonial.



**“Padi tetap tumbuh di sawah,
tetapi dunia yang mengelilinginya
berubah”**

Daftar Pustaka

- [1] [Deng, Zhenhua, Hsiao-chun Hung, Mike T. Carson, Adhi Agus Oktaviana, Budianto Hakim, dan Truman Simanjuntak. 2020. "Validating earliest rice farming in the Indonesian Archipelago." *Scientific Reports* 10, 10984. DOI 10.1038/s41598-020-67747-3. <https://www.nature.com/articles/s41598-020-67747-3>
- [2] Bellwood, Peter. 2007. *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Revised Edition. Canberra: ANU Press. <https://press.anu.edu.au/publications/prehistory-indo-malaysian-archipelago>
- [3] Alam, Ornob, Rafal M. Gutaker, Cheng-Chieh Wu, dkk. 2021. "Genome Analysis Traces Regional Dispersal of Rice in Taiwan and Southeast Asia." *Molecular Biology and Evolution* 38(11), 4832-4846. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8557449/>
- [4] [Christie, Jan Wisseman. 1982. *Sawah Cultivation in Ancient Java*. Tesis, Australian National University. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstreams/bae5fcfd-0e63-476b-a1b3-632f88bde1c6/download>
- [5] Griffiths, Arlo dan Emmanuel Francis. "The Stela of Canggal or Gunung Wukir (654 Saka)." *Nusantara Epigraphy*. <https://dharmalekha.info/texts/INSIDENKCanggal>
- [6] Noorduyn, J. dan H. Th. Verstappen. 1972. "Purnavarman's River-Works Near Tugu." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 128(2/3), 298-307. https://brill.com/view/journals/bki/128/2-3/article-p298_7.xml?language=en
- [7] Griffiths, Arlo dan Emmanuel Francis. "Tugu Boulder Inscription of Purnavarman." *Nusantara Epigraphy*. <https://dharmalekha.info/texts/INSIDENKTugu>
- [8] Christie, Jan Wisseman. 2021. *Early Tenth Century Java from the Inscriptions*. Leiden: Brill. <https://brill.com/downloadpdf/display/book/9789004486812/front-1.pdf>
- [9] Griffiths, Arlo dan tim. "The Harinjing Charter." *Nusantara Epigraphy*. https://dharmalekha.info/texts/DHARMA_INSIDENKHarinjing
- [10] Prasasti Kamalagyan, 1037 M. https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kamalagyan
- [11] Institut Teknologi Sepuluh Nopember. "Prasasti Kamalagyan." <https://www.its.ac.id/tgeofisika/wp-content/uploads/sites/33/2021/01/Paparan-Prasasti-Kamalagyan-Materi-Webinar-Teknik-Geofisika-ITS.pdf>
- [12] Pigeaud, Theodore G. Th. 1960-1963. *Java in the 14th Century. A Study in Cultural History*. The Nagarakertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D. The Hague: Martinus Nijhoff. <https://archive.org/details/in.gov.ignca.41302>

- 
- 
- [13] Pigeaud, Theodore G. Th. "Economy and Commerce in 14th Century Majapahit." Dalam Java in the 14th Century. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-7133-7_34
- [14] Hall, Kenneth R. Majapahit Empire. <https://archive.org/download/majapahit-empire-kenneth-hall/Majapahit%20empire%20Kenneth%20Hall.pdf>
- [15] de Graaf, H. J. Puncak Kekuasaan Mataram. Politik Ekspansi Sultan Agung. Jakarta: Pustaka Grafitipers. <https://archive.org/details/PuncakKekuasaanMataram>
- [16] Atlas of Mutual Heritage. "Siege of Batavia by the Sultan of Mataram." <https://www.atlasofmutualheritage.nl/page/3750/siege-of-batavia-by-the-sultan-of-mataram>